De Cive:
Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Vol. 4 No. 9 September Tahun 2024 | Hal. 305 – 310

Analisis Partai Politik dalam Pandangan Posiologi Politik dalam Masyarakat

Muhammad Rasyid [a,1*]
[a] Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
[1] rasyidmuuuh@upi.edu*
*korespondensi penulis

Informasi artikel :
Received: 15 Agustus 2024;
Revised: 22 Agustus 2024;
Accepted: 1 September 2024.

Kata-kata kunci:
Politik;
Masyarakat;
Pemilu.

ABSTRAK

Semua lapisan masyarakat di Indonesia sangat melek akan politik, terutama menjelang pemilu. Calon sukarelawan dan partai politik meramaikan suasana dengan membuat baliho pendukung untuk sepasang calon dari salah satu partai. Menurut UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang terdiri dari sekumpulan warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan aspirasi dan keinginan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, partai politik adalah organisasi yang stabil dan rapi, terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan cita-cita dan ideologi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam mempertahankan dan mencari kekuasaan melalui pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memainkan peran krusial dalam proses demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh partai politik dalam menjaga kohesi internal dan merespons dinamika politik yang berkembang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan strategi partai politik di masa mendatang.

Keywords:
Politic;
Public;
Election.

ABSTRACT

Analysis of Political Parties in the View of Political Posiology in Society. *All layers of society in Indonesia are highly politically aware, especially as elections approach. Volunteer candidates and political parties enliven the atmosphere by creating billboards in support of a pair of candidates from a particular party. According to Law No. 2 of 2008 on Political Parties, a political party is an organization consisting of a group of Indonesian citizens who share common aspirations and desires to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. In general, a political party is a stable and organized entity, composed of a group of people who share similar ideals and ideologies. This study aims to analyze the role of political parties in maintaining and seeking power through elections. The method used in this study is qualitative with a descriptive-analytical approach. The findings reveal that political parties play a crucial role in the democratic process and political stability in Indonesia. Furthermore, the study identifies challenges faced by political parties in maintaining internal cohesion and responding to evolving political dynamics. These findings are expected to provide insights for the development of political party strategies in the future.*

Copyright © 2024 (Muhammad Rasyid). All Right Reserved

How to Cite : Rasyid, M. (2024). Analisis Partai Politik dalam Pandangan Posiologi Politik dalam Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(9), 305–310. https://doi.org/10.56393/decive.v4i9.2108

This work is licensed under a *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*.
Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik yaitu pemilihan umum atau biasa di sebut pemilu (Triono, 2017). Pemilihan dapat di artikan salah satu cara warga negara untuk ikut serta dalam menentukan sosok atau leadership pemimpin, yang akan menguasai negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ketika demokrasi lebih luas dari orang-orang di dunia dan pada saat yang sama mendapat perhatian lebih, maka daripada itu penyelenggaraan daripada pemilu yang bersifat demokratis menjadikan salah satu syarat yang penting didalam melaksanakan pembentukan daripada kepemimpinan disebuah Negara. Pemilu mempunyai fungsi yang utama yaitu untuk menghasil kan sebuah ke pemimpinan yang benar - benar sangat mendekati daripada kehendak dan juga harapan daripadapada rakyat (Anggraeni et al., 2020). Oleh karenanya maka dari itu, pemilu adalah merupakan salahsatu sarana dari legitimasi kekuasaann.

Ada beberapa syarat agar Pemilu bisa di katakan menjadi demokratis sekaligus aspiratif. Yang ke satu yaitu, sudah seharusnya pemiluu mempunyai sifat yaitu kompetitiif, yang artinya peserta daripada pemiluu seharusnya otonom dan bebas (Prasetyoningsih, 2014). Yang Kedua yaitu, pemilihan umum sendiri di selenggara kan secara berkala, yang artinya pemilihan umum seharusnya di selenggara kan Secara teratur dan jelas pada interval tertentu (Kusmiati, 2023). Kemudian yang Ketiga adalah, pemilihan umum seharusnya inklusif, yang berati seluruh klompok didalam masyarakat sendiri harus memiliki peluang sama rata bagi yang ikut berpartisipasi didalam pemilu (Sholikin, 2019). Tiada satupun kelompok diperlakukan yang deskriminatif ataupun berbeda didalam sebuah proses dalam pemilu. Kemudian yang Keempat, pemilih sendiri diharuskan diberi sebuah keleluasa an didalam mendiskusikkan dan juga mempertimbankan pilihan yang alternatif dan secara bebas, tiada berada didalam bawah tekanan dari segi manapun, dan begitu pula akses dalam mendapatkan suatu informasi yang sangat luas juga. Yang Kelima yaitu, bagi penyelenggara dari sebuah pemilu yang harus independen dan tidak memihak.

Di dalam pilar demokrasi sebagai kedudukannya, partai politik mempunyai peran didalam sebuah sistem politik bertingkat nasional yaitu merupakan suatu wadah dalam menyeleksi figur ataupun tokoh pemimpin nasional serta wilayah. Pengalaman menggelar rangkaian pemilihan kepala daerah dan nasional melalui pilkada telah memungkinkan partai politrik berhasil menjadi pilar demokrasi. Banyak kalangan, termasuk kelompok internasional, percaya bahwa Pemilu 2004 sangat sukses. Melalui refleksi semacam ini, dapat dikatakan bahwa sistem politik negara sudah mulai ditinjau kembali sesuai dengan tatanan negara dan kehidupannya, termasuk pembentukan partai politik.

Status partai politik telah mengalokasikan sejumlah besar sumbangan untuk sistem politik nasional, terutama dalam perubahan kehidupan masyarakat Indonesia (Aminuddin dkk, 2015). Jika kemampuan dan kinerja partai dapat ditingkatkan, hingga perihal ini hendak mempengaruhi besar terhadap kenaikan mutu demokrasi dan juga kinerja pada sistem politik (Sawir, 2019). Maka Oleh karenanya sehingga kedudukan partai politik(PARPOL) butuh di tingkatkan pada kapasitas, mutu, serta kinerja nya pula supaya bisa mewujudkan aspirasi serta kehendak rakyat serta tingkatkan mutu demokrasi. Saat ini sedang dirampungkan setidaknya lima paket: UU di bidang politik buat menyambut pemilihan umum atau PEMILU atau pemilihan umum pada tahun 2009. daripada lima paket UU tersebut, maka setidaknya sukses dituntaskan ada tiga UU, ialah UU No. 22 Th 2007 tentang Penyelenggara PEMILU, UU No. 2 Th 2008 tentang Partai Politik, serta UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilihan Universal Anggota (DPR), Dewan Perwakilan Wilayah, serta DPR Wilayah. Kemudian Sisanya, ialah UU tentang Pemilihan Universal Presiden serta WAPRES atau Wakil Presiden serta UU tentang Lapisan serta Peran MPR, DPR DP Wilayah, serta DPR Wilayah hendak lekas di diskusikan di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat kepada masa persidangan selanjutnya.

Membangun demokrasi perwakilan dan mengorganisir perubahan pemerintahan secara teratur merupakan definisi pemilu global. Untuk teori demokrasi sederhana (Schumpeterian), pemilu adalah arena untuk menampung persaingan (persaingan) antar pelaku politik demi memperebutkan kekuasaan.

Keikutsertaan rakyat dalam politik untuk memastikan pilihannya; liberalisasi dari politik dan hak sipil dalam masyarakat. Demokrasi pula menekankan bahwa pemilu memberikan peluang kepada rakyat dan partai oposisi guna memberlakukan pengawasan dan keseimbangan pada partai yang berkuasa (partai yang berkuasa). Walaupun banyak yang menganggap konsep demokrasi minimalis, praktik demokrasi minimalis ini telah membentuk sistemnya untuk menentukan / mengisi posisi publik diseluruh negara-negara demokrasi. Yang berarti pemilihan umum sudah menjadi mekanisme dan telah telembaga universal pula dalam bentuk sistem politik pada negara demokrasi.

Menurut Miriam budiajo, definisi daripada partai Politik atau biasa di sebut PARPOL merupakan suatu Organisasi pada Politik dibangun buat kepentingan universal. Jadi daripada mari bisa juga dikatakan kalau PARPOL atau Partai Politik itu merupakan suatu bentuk organisasi yang bernazar mencapai kekuasaan demi kepentingan rakyat. Berdasar definisi ini Miriam Budiarjo membagi kedudukan serta guna partai Politik jadi: Fasilitas komunikasi politik yang artinya partai politik mempunyai tugas untuk menyalurkan seluruh aspirasi warga, serta seluruh aspirasi tersebut hendak ditampung supaya satu tujuan. Fasilitas sosialisasi politik artinya seluruh partai politik bertugas seperti pemberi proses pendidikan kekepada warga menimpa fenomena Politik yang terjalin. Fasilitas Recruitment Politik artinya partai Politik bertugas untuk merekrut orang- orang yang berbakat dalam bidang Politik untuk masuk ke dalam aktivitas Politik. Fasilitas Pengatur Konflik maksudnya Partai Politik berupaya buat meredam gejolak yang terjalin akibat pertentangan serta perbandingan komentar dalam warga masyarakat. Partai politik berangkat daripada asumsi kalau dengan membentuk sebuah wadah atau bentuk organisasi mereka yang dapat menyatukan perkumpulan orang- orang yang memiliki benak seragam sampai benak benak serta orientasi mereka dapat dikonsolidasi" (Maariam Budiardjo 2008).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SLR (*Systematic Literature Review*) dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti melakukan review dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara sistematis mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Triandini, Jayanatha, Indrawan, Putra, & Iswara, 2019). Adapun alasan kami menggunakan metode *Systematic Literature Review*, karena metode ini merupakan metode yang dilakukan secara terstruktur mengikuti tahapan-tahapannya, sehingga terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subyektif. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Scholar dari berbagai artikel terkait. Tentu peneliti memilih artikel yang erat kaitannya dengan kata kunci yang digunakan dalam penelitian. Langkah selanjutnya, peneliti mengelompokkan artikel-artikel yang ada. Setelah itu, peneliti menganalisis artikel tersebut yang kemudian tersaji pada bagian pembahasan dan kesimpulan. Pada bagian akhir penelitian, peneliti membandingkan temuan yang tersaji dalam artikel dan memberi kesimpulan (Sartika & Octafiani, 2019).

Hasil dan pembahasan

Ilmu yang menekuni bidang politik ataupun politics dan atau kepolitikan adalah definisi dari ilmu politik. Sementara Mariam Budiardjo 2008 mengatakan bahwa politik merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan. Dengan demikian kita bisa merumuskan kalau definisi daripada politik merupakan usaha buat menggapai sesuatu warga berbentuk harapan, kemauan serta kehidupan warga yang lebih baik daripadakepada yang saat ini lagi dialami. Terdapat Sebagian perihal yang menuju kepada berartinya buat menekuni sosiologi politik status sosial dalam masyarakat dan kekuasaan yang dipunyai oleh orang ataupun kelompok tertentu dalam warga masyarakat. Masalah kelas sosial dan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan penelitian sosiologi politik saat ini. Weber juga mendefinisikan politik sebagai alat perjuangan untuk bersama-sama menjalankan politik kekuasaan, atau alat perjuangan untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan (Sahid, 2011: 15). Dalam Ilmu Sosial, menurut

ramlan subkati 2020 sosiologi merupakan yang sangat mendasar serta universal. Sosiologi menolong para sarjana politik buat berupaya menguasai latar balik, struktur, serta pola pada kehidupan sosial di seluruh kelas serta kelompok warga (Mariam Budiardjo 2008). Politik merupakan masalah sebuah pilihan, yang mengaitkan alternatif kebijakan publik serta alternatif untuk orang- orang di bermacam posisi politik (Paramitha et al., 2021).

Karena kebutuhan publik biasanya lebih besar daripada kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pilihan kebijakan menjadi prioritas utama. Begitu pula dengan jumlah orang yang mau merambah jabatan politik umumnya jauh melebihi jumlah posisi yang ada, sehingga opsi siapa yang hendak berprofesi tergantung pada suara atau kekuasaan mayoritas. Maka dari itu, pengambilan keputusan memilih alternatif menjadi pejabat publik atau bisa juga dengan pengambilan keputusan politik dengan memilih kebijakan alternatif menjadi kebijakan publik. Yang juga menjadi permasalahan pilihan kebijakan publik yakni politik lokal, dengan melibatkan rakyat untuk menjadi pejabat publik merupakan sebuah jalan alternatif. Namun pilihan kebijakan dan pilihan masyarakat tidak hanya melibatkan daerah, yaitu provinsi, bupati / perkotaan, dan perdesaan, tetapi juga inisiatif, diskusi, dan keputusan. (Pilih alternatif kebijakan dan alternatif masyarakat) diselesaikan oleh penduduk lokal. Meski di era orde baru, politik lokal sebenarnya belum ada, meski ada juga kebijakan publik dan keputusan pejabat pemerintah (memilih alternatif) tentang, daerah / kota, desa dan juga provinsi (atau sebutan yang lain) saat itu. Politik lokal dulu di masa OrBa tidak ada, Sebab, keputusan dan juga pembahasan tentang kebijakan alternatif dan peran alternatif tak dilakukan oleh masyarakat sekitar, akan tetapi oleh pemerintah pusat atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Dengan menggunakan konsep teori sosiologis, sarjana politik bisa mengetahui sejauh apa struktur dan tingkatan sosial dipengaruhi atau terpengaruh oleh keputusan kebijakan, karakteristik serta karakteristik legitimasi politik, sumber otoritas politik (sumber otoritas politik), dan masyarakat. Social control serta perubahan sosial. Baik sosiologi dan ilmu politik belajar tentang negara. Namun sosiologi seringkali menganggap negara sebagai sebuah media kontrol sosial. Gambaran sosiologis, masyarakat yang sederhana dan kompleks selalu cenderung pada suatu bentuk, proses kontrol formal dan informal, tatanan atau metode kontrol muncul. Hubungan antara ilmu politik tak bisa dibatasi pada filsafat maupun sejarah, akan tetapi juga mencakup dari ilmu-ilmu sosial. Political Science adalah dapat dikategorikan menyeluruh mencakup social sciences dan sangat dekat terhadap anggota ilmu sosial yang lain. Serta hukum, sosiologi, ekonomi, antropologi psikologi sosial dan geografi sosial. Melalui beberapa tahapan penelitian yang telah dilakukan, sosiologi memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan politik. Peran ini terutama menyediakan data hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan, evaluasi pembangunan dan pelaksanaan.

Sebuah partisipasi politik dari warga masyarakat dalam pemilihan umum atau disebut pemilu pula amat ditentukan untuk kemajuan serta arah suatu negara. Kualitas daripada sebuah partisipasi politik bisa pula amat sangat menentukan apa kah orang yang menyelesaikan seluruh hak pilihnya wajib dapat memilih, apakah masyarakat dapat menikmati hak untuk memilih atau kenyamanan hak untuk memilih, dan apakah masyarakat dapat mendasarkan keyakinan dan keyakinannya pada calon terpilih. Pilih pemimpin yang benar-benar berkualitas. Masalah pilkada sebenarnya tidak terbatas pada teknis sering nya proses menemui banyak penyimpangan, namun persoalan utamanya adalah hasil atau substansi pemilihan umum jauh dari yang diharapkan. Hasilnya yang terakhir dari pemilu sebenarnya adalah lahirnya pemimpin dianggap ideal. Faktanya, adalah sampai sekarang ini, selain proses dari pelaksanaan yang amatir dan juga dianggap tidak profesional, para legislator yang ter-pilih melalui proses pemilihan umum masih merasa kualitasnya menurun atau rendah, daripada keahlian kepemimpinan yang terbatas, dan persoalan hukum yang belum mereka pimpin. Kemajuan dilakukan sampai mereka mengakhiri masa jabatan mereka.

Partai politik merupakan sekelompok yang terorganisir. Terdiri dari perkumpulan yang mempunyai ideologi tertentu dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan utama sebuah partai adalah untuk

mendapatkan kekuasaan atau status politik di suatu negara. Untuk mencapai tujuannya, partai politik menggunakan sarana konstitusional. Sebagai partai politik memiliki aspek-aspek sebagai berikut: (1) Media komunikasi. Parpol atau partai politik merupakan media berkomunikasi masayarakat dengan pihak pemerintah, atau antara pemerintah dengan masyarakat. Parpol memenuhi keinginan rakyat, menghimpun informasi sekaligus meneruskannya kepada pihak pemerintahan. Melewati komunikasi semacam ini, pemerintah bisa lebih mudah memilih kebijakan dan kebijakan didalam penyelenggaraan kepemerintahan. (2) Media sosialisasi. Parpol berperan dalam mensosialisasikan rencana berdasarkan sistem ideologis. Sosialisasi semacam ini merupakan salah satu bentuk promosi kepada seluruh parpol. Suatu bentuk promosi semua partai politik di masyarakat agar suatu saat bisa memilih partainya sendiri. Sosialisasi yang baik akan membuat orang lebih menyukainya dan memilih partai sebagai pemimpinnya. (3) Sebagai media perekrutan. Parpol adalah sekelompok atau individu yang memilih menjadi pemimpin. Pemimpin bisa menjadi pemimpin partai, atau pemimpin pemerintahan termasuk Pres dan wapres. perekruitan orang dan dilatih oleh parpol diharapkan menjadi pemimpin cakap. (4) Media pencegahan konflik. Pada pemerintahan atau sistem di suatu negara, akan selalu ada orang yang memiliki pendapat berbeda. Untuk menghindari konflik, disini peran parpol harus dimampukan menampung perbedaan pandangan/isu lain-lain melalui dialog. Dialog itu dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (Republik Demokratik Rakyat, Partai Demokrat, dan penjahat). Harapannya Dialog dapat menemukan keputusan politik yang sangat tepat bagi penyelesaian masalah atau persoalan tersebut.

Simpulan

Simpulan ilmu yang menekuni bidang politik ataupun politics dan atau kepolitikan merupakan defnisi dari ilmu politik. Sementara. Dengan demikian kita bisa merumuskan sedangkan politik merupakan usaha untuk menggapai sesuatu warga berbentuk harapan, kemauan serta kehidupan warga yang lebih baik dari pada saat dialami sekarag oleh masyarakat.

Referensi

Adi, Rianto. 2012. Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI.

Ali, Zainuddin. 2009. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Aminuddin, M. F., Ramadlan, M., & Shodiq, F. (2015). Match-All party: pragmatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, *1*(1), 2.

Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanshzil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense*. *418*(Acec 2019), 428–431. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081

Aziz, M. A. (2016). Pilkada serentak melalui DPRD: sebuah gagasan mewujudkan Pilkada demokratis perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *1*(2), 154-170.

Erwin, Muhamad. 2011. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusmiati, K. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Mustakim. 2000. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Surakarta: Khazanah Ilmu.

Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Ilsya, M. N. F., Anggraeni, L., & Gilang Ramadhan, M. (2021). Level of physical activity of Indonesian esport athletes in the piala Presiden esport 2019. *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran*, *7*(1), 71–83. https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v7i1.15642

Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *21*(2), 23.

Sawir, M. (2019). Tinjauan Mengenai Fungsi Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia. *Papua Review:*

Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan, *3*(1), 208-221.

Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, *5*(1), 87-108.

Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *5*(2).